

KURIKULUM BAHASA JAWA SMA/SMK

Sebuah Tinjauan Singkat¹

Oleh Setya Amrih Prasaja,S.S.²

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Pembelajaran bahasa Jawa di tingkat SMA/SMK/MA mungkin sesuatu yang baru dalam dunia pendidikan kita, apalagi setelah sekian lama pembelajaran bahasa Jawa hanya berhenti pada tingkat SMP/MTs. Undang - Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang digulirkan pemerintah pusat secara tidak langsung menghegemoni dan memberi keleluasaan daerah untuk lebih memperhatikan potensi daerahnya masing – masing. Dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Pusat di bidang Bahasa dan Sastra sastra Daerah telah menjadi kewenangan dan tanggung jawab daerah, dengan demikian diharapkan Bahasa dan Sastra Daerah dapat di lestarian dan dikembangkan untuk memperkaya khasanah budaya Nasional.³

Pelaksanaan Konggres Bahasa Jawa III di Yogyakarta menelurkan gagasan arti pentingnya pembelajaran bahasa Jawa di tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA, serta mengamanatkan agar pelajaran bahasa Jawa dimasukkan sebagai kurikulum muatan lokal di tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA. Melalui rekomendasi dari hasil putusan Konggres Bahasa Jawa III inilah maka

¹ Disampaikan pada TOT Pengembangan Model – model Pembelajaran bahasa Jawa, 4 – 7 November 2008. Islamic Center Manyaran Semarang.

² Staf pengajar bahasa Jawa SMA 2 Wonosobo.

³ Pusat Bahasa, 2001 : 9.

Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan SK Gubernur No 895.5/01/2005 tertanggal 23 Februari 2005. Surat Keputusan tersebut mengatur tentang Penetapan Kurikulum Mata Pelajaran Bahasa Jawa pada Jenjang Pendidikan SMA/SMALB/SMK/MA.

Geliat pembelajaran bahasa Jawa di tingkat SD/MI, SMP/MTs dalam tulisan ini tidak disinggung lebih lanjut, adapun yang akan dilihat lebih jauh adalah pembelajaran bahasa Jawa di tingkat SMA/SMK/MA. Hal tersebut menarik perhatian untuk lebih dikaji karena keberadaan muatan lokal ini masih baru dan tentunya masih banyak hal – hal yang perlu untuk dicermati. Bentuk – bentuk serta gambaran umum tentang penyusunan kurikulum muatan lokal bahasa Jawa serta penerapannya menjadi faktor utama dalam paparan tulisan ini.

Permasalahan yang muncul dan berkembang dalam pelaksanaan kurikulum khususnya untuk muatan lokal bahasa Jawa di tingkat SMA/SMK/MA yang berkembang saat ini sangat memungkinkan untuk ditinjau ulang⁴, namun sebelum sampai pada bagian tersebut ada beberapa hal yang perlu dicermati antara lain :

- a. Mengetahui dan mensikapi karakteristik bahasa Jawa dan permasalahan yang sering muncul di masyarakat, sehingga bisa disusun Kurikulum bahasa Jawa yang sesuai.
- b. Menyajikan, menyusun, mengembangkan dan menetapkan Standar Kompetensi serta Kompetensi Dasar yang sesuai karakteristik bahasa Jawa.
- c. Menyajikan serta menerapkan perkembangan teknologi informasi sebagai faktor pendukung proses kegiatan belajar mengajar.

Seperti halnya bahasa Indonesia, bahasa-bahasa Daerah juga mempunyai kedudukan dan fungsi yang tidak kalah pentingnya dengan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Menurut Hasan Alwi⁵ untuk mengetahui dan melihat kedudukan bahasa Daerah kita harus menggunakan dua sudut pandang. Pertama, bahasa Daerah

⁴ Hal ini terkait dengan banyaknya kesimpang siuran keberadaan kurikulum bahasa Jawa SMA yang dirasa tidak mencerminkan karakter pembelajaran bahasa Jawa itu sendiri.

⁵ Hasan Alwi dalam makalah *Kebijakan Bahasa Daerah* pada Konferensi Bahasa Daerah 6 s.d. 8 November 2000 di Jakarta.

sebagai sebagai sarana komunikasi bagi para penutur yang berasal dari kelompok *etnik* yang sama. Kedua, bahasa Daerah dalam kaitannya dengan bahasa Indonesia. Dari *point* pertama maka fungsi bahasa Daerah memiliki lima fungsi, yaitu ;

1. Bahasa Daerah sebagai lambang kebanggaan Daerah.
2. Bahasa Daerah sebagai lambang identitas Daerah.
3. Bahasa Daerah sebagai alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat Daerah.
4. Bahasa Daerah sebagai sarana pendukung kebudayaan Daerah, dan,
5. Bahasa Daerah sebagai pendukung bahasa dan sastra Daerah.

Dan apabila dilihat dari sudut pandang kedua, yaitu dari segi hubungan antara bahasa Daerah dan bahasa Indonesia, maka ada empat fungsi yang diemban oleh bahasa Daerah yaitu ;

1. Bahasa Daerah sebagai pendukung bahasa nasional,
2. Bahasa Daerah sebagai bahasa pengantar pada tingkat permulaan sekolah dasar,
3. Bahasa Daerah sebagai sumber kebahasaan untuk memperkaya bahasa Indonesia,
4. Bahasa Daerah sebagai pelengkap bahasa Indonesia di dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Menurut catatan Grimes⁶. Indonesia memiliki 672 bahasa Daerah. Adapun keberadaan bahasa-bahasa Daerah tersebut dimungkinkan lama kelamaan akan menyusut atau punah satu demi satu. Oleh karena itu timbul satu pertanyaan apakah dari sekian banyak bahasa Daerah dengan adanya politisasi bahasa Indonesia memiliki potensi dan kekuatan untuk tetap *exist* (bertahan). Dan tidak semua bahasa Daerah memiliki potensi yang sama, dan untuk mengetahui hal itu maka Krauss⁷ membagi bahasa-bahasa alami yang masih digunakan menjadi tiga kelompok .

⁶ Hasan Alwi. *ibid.*

⁷ Hasan Alwi. *ibid.*

Kelompok pertama terdiri atas bahasa-bahasa yang tidak dikuasai dan, oleh karena itu, tidak dapat digunakan oleh generasi muda dari kelompok penutur bahasa yang bersangkutan (*moribun*). Kelompok kedua berhubungan dengan bahasa-bahasa yang terancam punah dalam arti bahwa satu atau generasi mendatang dari kelompok *etnik* yang bersangkutan tidak akan lagi menguasai dan menggunakan bahasa-bahasa tersebut (*endangered*). Kelompok ketiga berkenaan dengan bahasa-bahasa yang tergolong aman dalam arti tidak terancam oleh kepunahannya (*safe*). Dari paparan di atas Krauss mencoba memberikan wacana tentang proses ketahanan bahasa-bahasa Daerah untuk tetap *exist* (bertahan), selain ditentukan oleh jumlah penutur, kekuatan dan potensi bahasa Daerah juga ditentukan oleh 3 (tiga) faktor, yaitu faktor budaya atau tradisi tulis, faktor pemakaian dalam bidang pendidikan, dan faktor peranannya sebagai sarana pendukung kebudayaan Daerah⁸.

Menurut laporan Biro Pusat Statistik dari data sensus tahun 1990 terdapat 8 (delapan) bahasa yang penuturnya berjumlah 2.000.000 orang atau lebih, yang menurut teori Krauss termasuk kategori aman (*save*). Adapun bahasa-bahasa tersebut bisa kita lihat pada tabel di bawah ini dengan urutan penutur terbanyak pada masing-masing bahasa :

NO	BAHASA DAERAH	JUMLAH PENUTUR
1	Bahasa Jawa	60.267.461 orang ⁹
2	Bahasa Sunda	24.155.962 orang
3	Bahasa Madura	6.792.447 orang
4	Bahasa Minangkabau	3.527.726 orang
5	Bahasa Bugis	3.228.742 orang
6	Bahasa Batak	3.120.047 orang

⁸ Hasan Alwi, *ibid*.

⁹ Bahkan sekarang mencapai 80 juta penutur. Lihat dalam keputusan kongres bahasa Jawa IV tahun 2006.

7	Bahasa Banjar	2.755.337 orang
8	Bahasa Bali	2.589.256 orang

Sedangkan bahasa-bahasa Daerah yang tercatat memiliki tradisi tulis ada 10 (sepuluh) bahasa Daerah yaitu untuk bahasa-bahasa *Bali, Jawa, Sunda, Bugis/Makasar, Karo, Mandailing, Lampung, Rejang, Toba, dan Kerinci*.

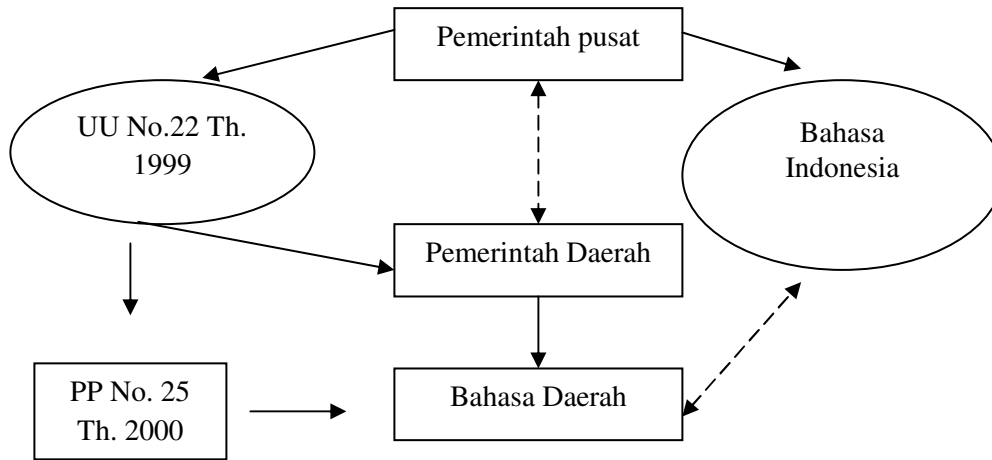
Banyak bermunculan wacana dan opini publik yang lepas kontrol tentang *pengejawantahan* bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional (persatuan), dan keberadaan bahasa Daerah dalam hubungannya dengan keutuhan dan integritas bangsa. Isu disintegrasi selalu muncul seiring keinginan Daerah, dalam kaitannya dengan pengembangan budaya atau bahasa Daerah muncul ke permukaan. Padahal kalau kita mau memandang permasalahan yang muncul ini lebih bijak, dan mau menjadikan hal tersebut sebagai studi kasus dalam mencari relasi antara pengembangan bahasa Indonesia di satu sisi, dan bahasa Daerah pada sisi yang lain. Mungkin akan kita temukan pecahan-pecahan dari hasil budaya dan pengembangan bahasa Daerah, untuk bisa kita susun menjadi *mozaik* yang lebih indah dan berkarakter. Bukan malah sebaliknya, bahwa bahasa Indonesia sebagai momok bagi berkembangnya bahasa dan sastra Daerah, begitu juga bahasa Daerah menjadi momok bagi bahasa Indonesia dalam melebarkan sayapnya. Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius karena banyak dari sastrawan lokal (Daerah) yang merasa lahannya tergusur dengan adanya pengindonesiaan dalam bahasa, sehingga mereka merasa tidak mendapat porsi yang memadai, dalam kaitannya dengan pengekspresian serta pengaktualisasian sastra, bahasa serta budaya Daerah yang sebetulnya justru merupakan hulu serta hilir dari perkembangan sastra serta budaya Indonesia pada masa mendatang.

Dikatakan hulu, karena sastra, bahasa serta budaya Daerah merupakan sumber serta pendukung perkembangan sastra, bahasa serta budaya nasional kita. Sastra Daerah memperkaya wacana sastra Indonesia, bahasa Daerah memperkaya kosakata

bahasa Indonesia sedangkan budaya Daerah menyokong budaya nasional yang kesemuanya itu membentuk sebuah *kekarakteristikan* serta kekhasan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Hal yang tidak akan di temui di belahan bumi manapun selain Indonesia. Sementara dikatakan hilir karena pada akhirnya kesemuanya itu akan bermuara pada satu tempat yang sama yaitu identitas Ke-Indonesiaan.

Asumsi di atas itulah yang kemudian berkembang dan memunculkan wacana perlunya sebuah semangat dan inisiatif daerah untuk kembali memberdayakan apa yang telah dimilikinya, dalam hal ini bahasa, karena setelah penyelenggaraan Republik ini mengalami beberapa perubahan, yang tidak lain merupakan imbas dari *globalisasi*, maka sistem penyelenggaraan Pemerintahan yang bersifat *sentralistik* atau terpusat, diubah ke arah *desentralisasi* yang lebih bersifat kedaerahan namun masih dalam kerangka negara kesatuan. Diberlakukannya Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan Pemerintah Pusat di bidang bahasa dan sastra Daerah pun secara otomatis menjadi tanggung jawab Daerah. Sedangkan bagi Pemerintah Pusat, sehubungan dengan perkembangan kebudayaan dan bahasa Daerah ialah dengan mengadakan penerjemahan berbagai hasil kebudayaan Daerah ke dalam bahasa Indonesia. Serta bisa meminimalkan pengambilan secara utuh (*adoption*) bahasa asing yang berlebihan ke dalam sistem kosakata bahasa Indonesia, serta bisa membendung *infiltrasi* pengaruh bahasa yang lebih luas lagi, dengan pemberdayaan bahasa Daerah yang kita miliki untuk memperkaya dan mencari padanan kata atau istilah asing yang banyak berserak pada tradisi karya tulis kita saat ini, tak terkecuali di dalam tulisan ini sekalipun. Dan Pemerintah Pusat lebih bisa menfokuskan perhatiannya pada pembinaan serta pengembangan bahasa Indonesia yang lebih baik, sehingga akan tercipta sebuah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah, dalam hal pembinaan kebahasaan. Sehingga Pemerintah Daerah tidak merasa was-was bahasa Daerahnya punah, serta Pemerintah pusat bisa memperkaya bahasa Indonesia dengan istilah-istilah yang banyak terdapat dalam

bahasa Daerah. Hingga *adopsi* berlebihan terhadap bahasa Asing tidak terjadi. Adapun untuk memudahkan pemahaman tentang kewenangan pembinaan bahasa Daerah¹⁰ oleh Pemerintah Daerah sesuai amanat otonomi Daerah yang terdapat pada UU No. 22 Tahun 1999 dapat kita lihat seperti pada bagan di bawah ini :



Keterangan :

- : hubungan kordinasi birokrasi (hubungan langsung).
- ←-→ : hubungan timbal balik.

2. KERANGKA BERPIKIR

Melalui acuan berpikir, serta asumsi bahwa beberapa hal tersebut di atas merupakan faktor utama keberhasilan suatu proses kegiatan belajar mengajar pada suatu Satuan Pendidikan, maka dengan menggunakan pendekatan observasi ini dimungkinkan, dan diharapkan bisa menjadi media bertukar informasi demi mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan.

¹⁰ Daerah yang mempunyai bahasa sendiri, yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik, bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara juga oleh Negara.(Dendy Sugono&Abdul Rozak Zaidan,2000).

Pendekatan observasi akan dilakukan dengan mengumpulkan beberapa sumber data yang relevan dan bisa dijadikan pijakan arah penelitian ke depan, dengan tanpa meninggalkan asumsi bahwa sebuah penelitian tidak hanya berhenti pada suatu titik tertentu, namun hasil sebuah penelitian bisa terus mengalami kajian dan telaah lebih jauh untuk mencapai penelitian – penelitian lain yang serupa.

Dalam salinan sosialisasi KTSP Departemen Pendidikan Nasional tentang Pengembangan Model Mata pelajaran Muatan Lokal, dipaparkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Tujuan pengembangan Mulok, Memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan perilaku kepada peserta didik agar mereka memiliki wawasan yang mantap tentang keadaan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai/aturan yang berlaku di daerahnya dan mendukung kelangsungan pembangunan daerah serta pembangunan nasional.
- b. Batasan umum atau definisi kurikulum, seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
- c. Batasan umum atau definisi Muatan Lokal, merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi mata pelajaran muatan lokal dapat ditentukan oleh satuan pendidikan, tidak terbatas pada mata pelajaran keterampilan.

3. HIPOTESIS

Sesuai dengan beberapa batasan umum tentang Pengembangan Model Mata Pelajaran Muatan Lokal, dalam hal ini dikhususkan pada mata pelajaran Bahasa Jawa, maka perlu diterapkan sebuah rumusan yang sesuai dengan karakteristik muatan

lokal, kebutuhan masyarakat, karakteristik peserta didik, dan potensi yang ada pada satuan pendidikan bersangkutan.

Sedikit banyak di atas telah di bahas bagaimana posisi masing-masing yang dimiliki oleh bahasa Daerah yang pada poin ini dikhususkan pada bahasa Jawa dan bahasa Indonesia menempati kedudukannya dalam khazanah kebahasaan kita, maka alangkah bodohnya kita sebagai bangsa Indonesia apabila sekian banyak kekayaan ragam bahasa yang kita miliki mengalami kepunahan serta jauh dari masyarakat penuturnya.

Patut disyukuri dengan bergulirnya otonomi daerah ini banyak daerah yang kembali melirik pembinaan bahasa daerahnya masing-masing dengan memasukkan pelajaran bahasa daerah sebagai muatan lokal hingga level pendidikan menengah atas.

Ada beberapa hal yang perlu dicatat dalam pembelajaran bahasa Daerah khususnya Jawa pada milenium ini, karena sekian lama pembelajaran bahasa Jawa seolah dijauhkan dan dianak tirikan dari masyarakat penuturnya sehingga keberadaannya menjadi asing di mata masyarakat Jawa sendiri, apalagi keberadaan aksara Jawa jauh dari konsumsi dan jangkauan masyarakat. Berbeda kasus dengan aksara Bali, Bugis yang masih bertahan digunakan masyarakat pendukungnya sebagai sarana mengembangkan budaya daerahnya.

Banyak buku pelajaran bahasa Jawa jauh dari pemakaian aksara Jawa, padahal aksara Jawa seharusnya selalu dihadirkan pada setiap pembelajaran seperti halnya ketika kita belajar bahasa Arab, Mandarin, Korea serta Jepang yang tidak bisa lepas dari aksaranya masing-masing. Begitupun juga seharusnya bahasa Jawa dan aksara Jawa karena bahasa Jawa dan aksara Jawa tidak hanya dipelajari oleh masyarakat Jawa saja namun juga dipelajari banyak pelajar dan mahasiswa di Eropa, Australia bahkan di Amerika.

Dari buku yang membahas bahasa, sastra serta kebudayaan Jawa banyak ditulis oleh penulis asing ketimbang orang Jawa sendiri dan ironisnya buku mereka selalu dijadikan acuan oleh banyak sarjana di Indonesia ketika mereka ingin menyelami lebih dalam tentang bahasa, sastra dan kebudayaan Jawa.

Pembelajaran bahasa Jawa serta aksara Jawa seharusnya menjadi perhatian banyak pihak demi kelestarian bahasa, aksara serta kebudayaan Jawa mendatang.

Penerapan yang tepat sasaran akan berdampak positif dan bermanfaat bagi peserta didik serta imbasnya akan dinikmati masyarakat luas. Sehingga tujuan dari diterapkannya sebuah muatan lokal tidak hanya sebatas pada formalitas belaka, namun benar – benar bisa menghasilkan *out put* yang bisa diandalkan dan dipertanggungjawabkan.

Adapun beberapa hal yang tidak kalah pentingnya dalam menunjang proses pembelajaran mulok bahasa Jawa dan imbas dari adanya kurikulum bahasa Jawa yang ideal dengan menyediakan sarana prasarana yang memadai, sehingga bisa mendukung proses belajar mengajar yang bermutu dan berkompeten, dan akan berdampak pada hasil lulusan. Sarana dan prasarana yang dimaksud antara lain ;

a. Laboratorium bahasa ;

Ketersediaan laboratorium bahasa atau ruang multimedia akan sangat mendukung proses belajar mengajar yang erat kaitannya dengan ilmu yang konsisten mempelajari bahasa.

b. Perpustakaan

Selain sarana atau potensi yang dipaparkan di atas, ada satu hal lagi yang tidak bisa dilepaskan dari segala macam kegiatan proses pembelajaran – yaitu perpustakaan, karena terjamin tidaknya mutu sebuah pendidikan disebuah instansi penyelenggara pendidikan terlihat pada bagaimana pengelolaan, penerapan, penyelenggaraan, dan kelengkapan sumber referensi yang dikoleksi, maupun keterjangkauan serta kemudahan akses perpustakaanannya.

Kehadiran sebuah perpustakaan pada setiap satuan pendidikan termasuk pendidikan sekolah merupakan suatu keharusan.¹¹ Lembaga perpustakaan sekolah menengah atas merupakan bagian integral lembaga pendidikan menengah sekaligus sebagai kelengkapan pendidikan menengah yang merupakan bagian terpadu dalam sistem kurikulum pendidikan menengah.¹²

4. PENERAPAN DAN PROSES PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL BAHASA JAWA.

Ketersediaan bahan ajar serta perangkat pembelajaran bahasa Jawa di tingkat SMA, sejauh ini mengacu pada perangkat kurikulum yang dikembangkan dari dikeluarkannya SK Gubernur Jawa Tengah No 895.5/01/2005 tertanggal 23 Februari 2005. Mencermati beberapa hal tersebut di atas, selayaknya penentuan Standar Isi benar – benar memperhatikan aspek dan faktor seperti berikut ini :

- a. Kebutuhan dan karakteristik daerah masing – masing.
- b. Identifikasi terhadap kelayakan standar isi terhadap kondisi nyata di lapangan, bukan hanya sekedar konseptual belaka.
- c. Melihat karakteristik muatan lokal itu sendiri.
- d. Sistematis dan berdaya guna ke depan, dan tingkat keberlangsungannya bisa dipertanggung jawabkan.

Melalui mekanisme identifikasi, baik melalui studi kelayakan dengan memperhatikan beberapa faktor maka dirumuskan standar isi untuk muatan lokal bahasa Jawa adalah sebagai berikut :

- a. Pembelajaran bahasa Jawa, secara makro hampir serupa dengan pembelajaran bahasa – bahasa lain, yaitu untuk menguasai setidaknya tatabahasa, yang terjabarkan dalam kemampuan, membaca (*reading*), menulis (*writing*), mendengar (*listening*), dan berbicara (*speaking*). Ini

¹¹ Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2006 : 1.

¹² Soejono, 1997 : 9.

sebetulnya yang menjadi tolok ukur pembelajaran untuk disiplin ilmu yang konsisten mempelajari bahasa¹³.

- b. Keterkaitan aspek satu dengan yang lainnya harus runtut, seimbang dan berkesinambungan, logikanya apabila keempat aspek tersebut tercerai berai maka substansi pembelajaran bahasa tidak akan pernah menemukan arah yang jelas.

Proses pembelajaran bahasa Jawa dewasa ini hampir di bagian jenjang tidak begitu memperhatikan hal – hal dasar karakteristik bahasa Jawa, sehingga terjadi kerancuan di sana – sini dan berakibat pudarnya minat peserta didik pada pelajaran bahasa Jawa itu sendiri, oleh karena itu perlu dirumuskan sebuah rumusan baru untuk lebih bisa mengoptimalkan pembelajaran bahasa Jawa yang sistematis, karena penguasaan bahasa Jawa dengan baik akan membuka titik – titik akses yang dikehendaki sesuai dengan tujuan akhir dari diberikannya sebuah mata pelajaran bahasa Jawa kepada peserta didik.

Peluang dan tantangan terhadap proses pembelajaran muatan lokal bahasa Jawa terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar merupakan sebuah mekanisme dialektika, dimana hubungan sebab akibat sangat kental. Masyarakat dan lingkungan sekitar merupakan hulu dan hilir dari sebuah proses pembelajaran itu sendiri, karena peserta didik berasal dari sana dan kembali lagi ke sana. Adapun beberapa peluang yang relevan dengan adanya proses pembelajaran bahasa Jawa terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar adalah :

- a. Menciptakan sebuah mekanisme dimana peserta didik mengalami proses pentransferan ilmu dari kearifan lokal masyarakat setempat.
- b. Menciptakan media tukar informasi etika, dan tata norma masyarakat dalam *scope* masyarakat yang berlatar belakang budaya Jawa.

¹³ Bekal tersebut tidak dimaksudkan untuk membuat anak didik di jenjang SMA menjadi ahli bahasa, namun lebih ditekankan pada pematapan pondasi keberaksaraan dan kebahasaan Jawa mereka, sehingga diharapkan setelah mempelajari bahasa Jawa mereka bisa mengemplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat, dengan bekal yang memadai.

Dari beberapa faktor yang telah disampaikan di awal tulisan ini, hal yang perlu dibahas adalah adanya kerancuan – kerancuan yang terjadi pada penjabaran Standar Kompetensi dan Kompetensi yang di acu, hal ini terjadi karena banyak faktor yang sama sekali tidak tersentuh bahkan terkesan tidak relevan dengan proses pembelajaran bahasa Jawa itu sendiri. Notoatmodjo¹⁴ berpendapat bahwa hal tersebut terjadi karena berbagai sebab antara lain :

1. Kurikulum tersebut kemungkinan *over crowded* sehingga menimbulkan kerancuan penafsiran. dan seolah hanya merupakan alih bahasa dari kurikulum yang ada pada mata pelajaran bahasa Indonesia, padahal karakteristik bahasa Jawa jelas berbeda dengan bahasa Indonesia begitu juga sebaliknya.
2. Kurikulum tersebut tidak relevan, yang berarti tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat.
3. Kurikulum tersebut tidak efektif, karena terjadinya materi yang tumpang tindih dan tidak sistematis maka berakibat tidak membekas pada peserta didik, malah membuat peserta didik semakin jauh dari pemahaman mereka dengan apa yang dipelajarinya.

Tabel di bawah ini merupakan gambaran kurikulum, dari yang sudah ada dan banyak di acu dengan kurikulum yang telah mengalami modifikasi disesuaikan dengan kenyataan di tingkat pelaksanaan dan kondisi, latar belakang peserta didik serta karakteristik bahasa Jawa, dan hanya dipaparkan sebagian saja.

¹⁴ Notoatmodjo, 1998 : 51 – 52.

Tabel 1. Standar Kompetensi kelas X semester I¹⁵ ;

NO	SK	SK MODIFIKASI
1	Mampu mendengarkan dan memahami serta menanggapi berbagai bentuk wacana lisan nonsastra berupa pengumuman, berita dan cerkak.	Mampu menguasai dan paham materi tentang sejarah bahasa dan sastra Jawa, serta mengenal beberapa aspek budaya lainnya.
	Mampu membaca dan memahami berbagai teks bacaan nonsastra dengan berbagai teknik membaca untuk berbagai tujuan.	Mampu menguasai dan paham materi tentang kosakata, kata-kata, kalimat maupun ujaran bahasa Jawa.

Tabel 2. Standar Kompetensi kelas XI semester I dan II ;

NO	SK	SK MODIFIKASI
1	Mampu membaca dan memahami berbagai teks bacaan nonsastra berbahasa Jawa dengan berbagai teknik membaca untuk berbagai tujuan	Mampu menguasai dan paham materi beberapa aspek kebahasaan baik sastra maupun non-sastra.
2	Mampu mendengarkan dan menjelaskan pikiran, pendapat dan gagasan secara lisan dalam pidato, dialog dan musyawarah dalam berbagai ragam Bahasa Jawa dengan unggah – ungguh Basa Jawa	Mampu menguasai dan paham wacana dalam bahasa Jawa, seluk beluk keahlian selain bahasa, sengkalan, pustaka Jawa, wayang serta budipekerti luhur.

¹⁵ Untuk lebih detilnya bisa dilihat dalam lampiran

Tabel 3. Standar Kompetensi kelas XII semester I ;

NO	SK	SK MODIFIKASI
1	Mampu mendengarkan dan memahami serta menanggapi sebagai ragam wacana lisan nonsastra berupa berita dalam berbagai ragam bahasa jawa	Mengetahui dan mampu mengekspresikan gagasan melalui kata atau tulisan dalam bahasa Jawa berbagai ragam, dan mampu menyampaikan di depan umum.

Penjelasan :

Terkait dengan Standar Kompetensi kelas X semester I “*Mampu mendengarkan dan memahami serta menanggapi berbagai bentuk wacana lisan non sastra berupa pengumuman, berita dan cerkak*”. Dengan karakteristik peserta didik dari masyarakat yang ada di daerah Jogja maupun Surakarta dan sekitarnya mungkin tidak begitu mengalami kendala yang berarti¹⁶. Dengan kata lain bagaimana seorang mampu memahami wacana lisan, sementara kita tahu bahwa untuk bisa memahami sebuah wacana seseorang harus memiliki bekal morfologi, serta sintaksis maupun tata bahasa dan kosakata yang cukup. Selain dari itu, banyak kosakata Jawa baku yang tidak dimengerti oleh peserta didik, kenyataan yang ironis sekali ketika mengajarkan bahasa ibu sendiri seperti mengajarkan bahasa asing. Kemungkinan apabila peserta didik diberi pengenalan materi tentang, apa itu bahasa Jawa, kemudian bagaimana karakteristik bahasa Jawa, sejarah bahasa Jawa, tata bahasa Jawa dengan baik dan

¹⁶ Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa pelajaran bahasa Jawa yang diajarkan mulai jenjang pendidikan dasar hingga menengah adalah bahasa Jawa yang digunakan atau berkembang pada masyarakat budaya Surakarta dan Yogyakarta. Sehingga memunculkan sebuah anggapan bahwa bahasa Jawa yang dianggap standar adalah gaya bahasa Surakarta maupun Yogyakarta, sehingga bagi masyarakat Jawa yang ada di sekitar ke dua wilayah tersebut tidak mengalami kendala berarti dalam memahami kosakata-kosakata Jawa.

sistematis maka tujuan dari pembelajaran bahasa Jawa akan lebih mengena dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat Jawa itu sendiri.

Selain daripada itu, karakteristik peserta didik pada jenjang sekolah menengah atas berbeda dengan jenjang sekolah menengah pertama, maupun dasar. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka sudah selayaknya proses pembelajaran bahasa Jawa dikembalikan dan difokuskan pada karakteristik bahasa itu sendiri, sehingga tidak melebar kemana – mana. Kemampuan berbahasa Jawa, adalah modal awal dan utama seseorang bias melihat, menyelami, mengamati, mempraktekan, dan mengevaluasi serta memberikan apresiasi apapun yang timbul dari digunakannya bahasa tersebut pada masyarakat Jawa, karena dengan bekal penguasaan bahasa Jawa yang cukup seseorang akan bisa mengetahui :

1. Bagaimana tata bahasa masyarakat Jawa,
2. Bagaimana tata norma yang berkembang dan disepakati dalam pola kehidupan masyarakat Jawa.
3. Bagaimana dan apa saja hasil kreasi budaya masyarakat Jawa.

Ketiga hal tersebut di atas hanya gambaran umum, ketika seseorang menguasai bahasa Jawa dengan cukup, karena pada hakekatnya bahasa adalah media komunikasi yang akan dan selalu ada pada setiap geliat budaya masyarakat manusia dimanapun. Sehingga diharapkan penguasaan bahasa Jawa yang cukup akan berimbas pada munculnya kemampuan dan kemampuan untuk memberikan apresiasi, penilaian, komentar bahkan mungkin sumbangsih pemikiran terhadap hasil kreasi budaya Jawa.

Berdasar asumsi tersebut maka sudah selayaknya pembelajaran bahasa Jawa kembali ditekankan pada kemampuan tatabahasa, yang dalam penjabarannya disampaikan secara garis besar seperti di bawah ini ;

1. Pengenalan tentang bagaimana sejarah bahasa dan sastra Jawa.
2. Pengenalan tentang bagaimana sejarah aksara Jawa beserta pedoman penulisan yang ada.
3. Pemahaman tentang adanya sistem undha – usuk bahasa.

4. Penyampaian yang sistematis dalam kaitannya dengan pembelajaran bahasa – setidaknya mengetahui sistem *paramasastra* secara utuh dan berkesinambungan.
5. Pengayaan terhadap materi yang berkaitan erat dengan penggunaan bahasa dan Sastra Jawa dalam kehidupan masyarakat Jawa.

Kelima poin tersebut di atas hanya gambaran secara umum bagaimana selayaknya kurikulum bahasa Jawa dihadirkan untuk menjawab tantangan ketatabahasa dan pemakaian serta pelestarian bahasa Jawa ke depan.

Untuk melihat lebih jelas bagaimana alur pembelajaran bahasa Jawa dan capaian hasil yang akan terlihat bias di amati pada diagram berikut di bawah ini :

Diagram. 1 proses pengidentifikasian kurikulum bahasa Jawa SMA/MA/SMK

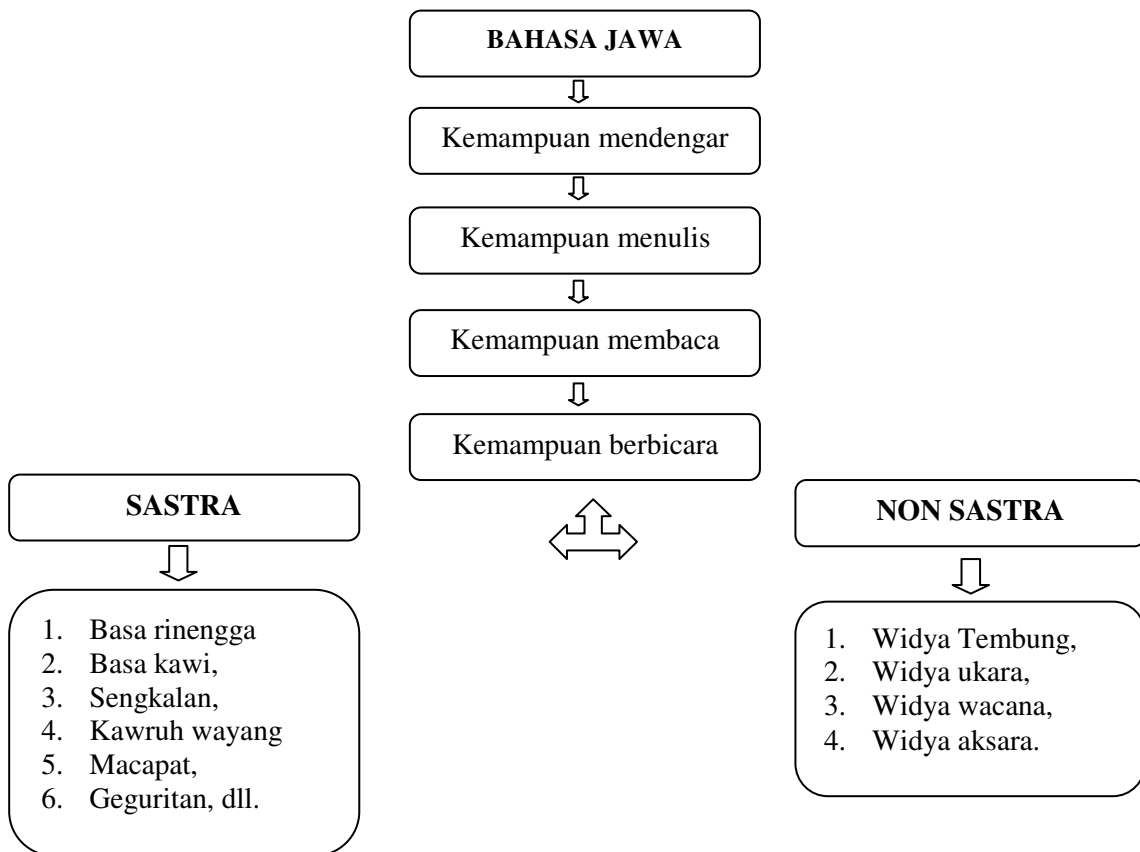
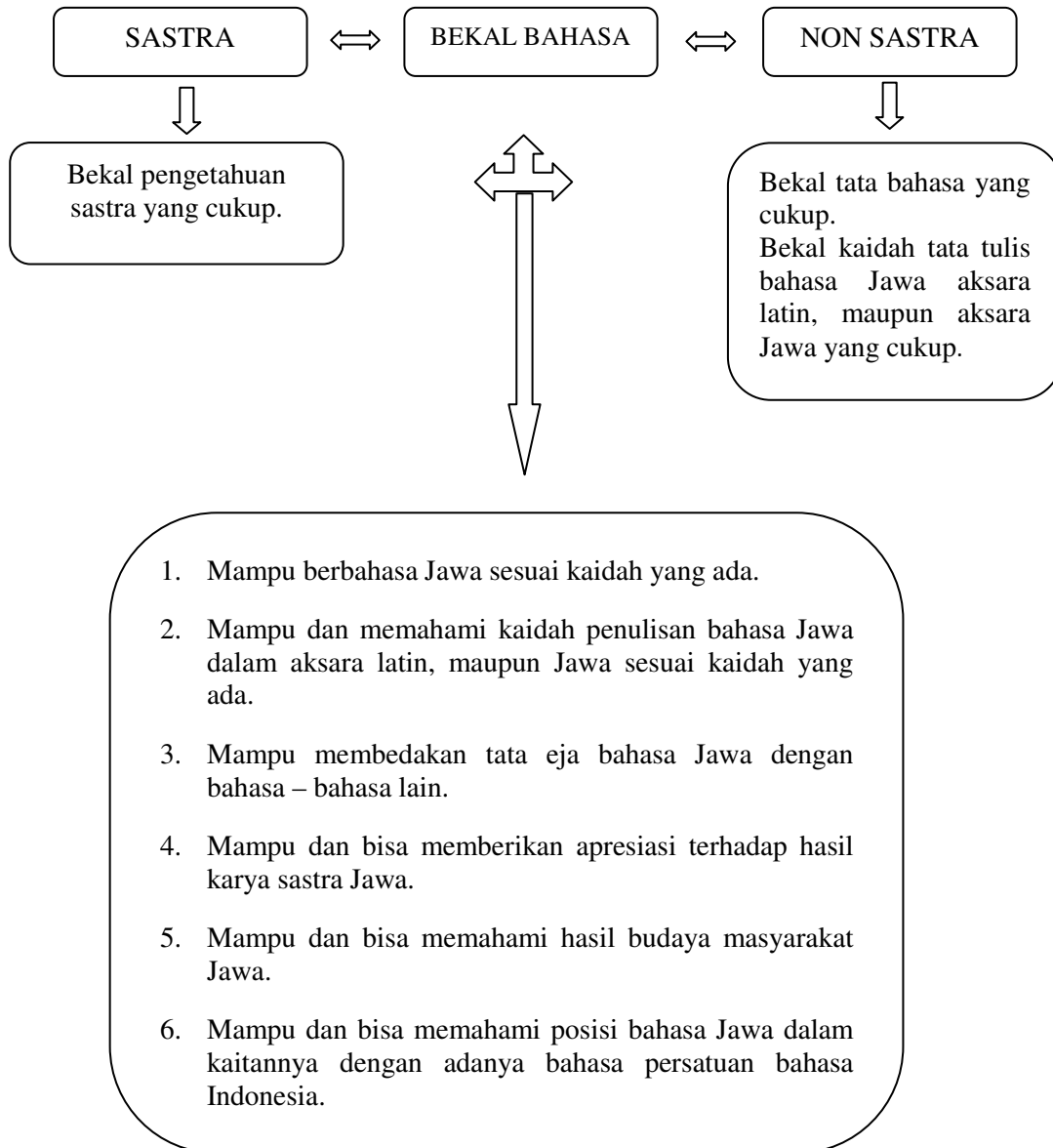


Diagram 2. Hasil capaian kurikulum bahasa Jawa SMA/MA/SMK



Penelusuran, pemetaan dan kajian sehubungan dengan perlunya peninjauan kembali terhadap sebuah kurikulum bahasa Jawa, dalam hal ini terutama untuk jenjang SMA terjadi karena beberapa faktor seperti di bawah ini ;

1. Kurangnya kesadaran, dan ketidakfahaman beberapa kelompok masyarakat bahwa bahasa Jawa memiliki karakteristik dan tata bahasa sendiri ;

“Durung suwé iki aku lunga Jogja¹⁷”

kesalahan terjemahan pada idiom bahasa Indonesia “Belum lama ini”. Frasa *durung suwé iki* dalam tata bahasa Jawa tidak lazim, karena bahasa Jawa memiliki idiom sendiri untuk terjemahan “Belum lama ini”, yaitu *“mentas waé”*. Jadi kalimat *“durung suwé iki aku lunga Jogja”* menjadi *“mentas waé aku lunga Jogja”*.

Coba cermati satu kalimat bahasa Jawa berikut ini :

“Bok bilih wonten kalepatan anggén kawula matur, kawula nyuwun pangapunten ingkang seageng-agengipun”

Kalimat di atas adalah hasil terjemahan dari kalimat bahasa Indonesia ;

“Kalau ada kesalahan tutur kata saya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya”. Padahal kalimat bahasa Indonesia di atas seharusnya dialihbahasakan ke dalam bahasa Jawa menjadi ;

“Bok bilih wonten kalepatan anggén kula matur, kula nyuwun gunging samudra pangaksama”.

2. Terjadinya banyak kesalahan penulisan bahasa Jawa dalam tulisan Latin, hal ini terjadi karena ketidaktahuan masyarakat bahwa bahasa Jawa memiliki karakteristik tata eja sendiri yang tidak bisa disamaratakan dengan bahasa lain, termasuk bahasa persatuan bahasa Indonesia.

<i>Ojo</i>	padahal yang dimaksud	<i>aja</i>
<i>Sopo</i>	padahal yang dimaksud	<i>sapa</i>

¹⁷ Suwardi, 2007.

<i>Coro</i>	padahal yang dimaksud	<i>cara</i>
<i>Loro</i>	padahal yang dimaksud	<i>lara</i>
<i>Alon – alon</i>	padahal yang dimaksud	<i>alun - alun</i>
<i>Pateng</i>	padahal yang dimaksud	<i>pating</i>

Contoh lain penulisan latin bahasa Jawa yang tidak mengindahkan tata eja bahasa Jawa ;

“Monggo sesarengan kito sedoyo minongko kawulo dalem Gusti”

Dan lain sebagainya.

3. Jauhnya anak didik dan generasi muda dengan kekayaan dan hasil karya sastra maupun budaya masyarakat Jawa, hal ini terjadi lebih karena tidak adanya penguasaan bahasa Jawa yang baik di kalangan generasi muda, sehingga mereka tidak bisa menikmati indahny sebuah pagelaran wayang kulit, tidak bisa menikmati dan memahami betapa tingginya seni gamelan dan seni tarik suara Jawa.
4. Terjadinya simpang siur dan ketidakkonsistenan penulisan bahasa Jawa dalam aksara Jawa, seperti yang diketahui bahwa tata eja penulisan aksara Jawa yang dikenal sebagian masyarakat Jawa adalah *weton Sriwedari* dan Pedoman 1996. Perlunya pemahaman pedoman tata tulis aksara Jawa baik *weton Sriwedari* maupun 1996, akan sangat berdampak pada pemahaman anak didik terhadap tata tulis Jawa tersebut. Oleh karena itu setidaknya pembelajaran materi aksara Jawa di bagi dalam tiga porsi :
 - a. Pemberian materi tata tulis aksara Jawa pedoman 1996 untuk jenjang pendidikan SD/MI.
 - b. Pemberian materi tata tulis aksara Jawa pedoman 1996 untuk jenjang pendidikan SMP/MTs.
 - c. Pemberian materi tata tulis aksara Jawa pedoman 1926 (*Sriwedari*) untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK.

Tabel di bawah ini memuat sedikit gambaran perbedaan pedoman tata tulis aksara Jawa ;

LATIN	SRIWEDARI	1996
Buana	ꦧꦸꦤꦤ	ꦧꦸꦤꦤ
Kanthi	ꦏꦤ꧀ꦠꦶ	ꦏꦤ꧀ꦠꦶ
Astha	ꦲꦱ꧀ꦠ	ꦲꦱ꧀ꦠ
Panca	ꦥꦤꦕ	ꦥꦤꦕ
Sinangling	ꦱꦶꦤꦒꦶꦭꦶꦁ	ꦱꦶꦤꦒꦶꦭꦶꦁ
Serat	ꦱꦺꦫꦠ	ꦱꦺꦫꦠ
Adhiné	ꦲꦢꦶꦤꦺ	ꦲꦢꦶꦤꦺ
Karsa	ꦏꦫꦱ	ꦏꦫꦱ
Surakarta	ꦱꦸꦫꦏꦠ	ꦱꦸꦫꦏꦠ
Bupati	ꦧꦸꦥꦠ	ꦧꦸꦥꦠ
Angka	ꦲꦁꦏ	ꦲꦁꦏ
Wis resik	ꦮꦶꦱꦫꦺꦱꦶꦏ	ꦮꦶꦱꦫꦺꦱꦶꦏ

5. PENUTUP DAN SIMPULAN

Demikian sedikit tinjauan singkat tentang proses pembelajaran muatan lokal bahasa Jawa dan pemetaan karakteristik kurikulum bahasa Jawa, ada beberapa hal yang bisa ditarik kesimpulan dari tulisan singkat ini terkait dengan proses pembelajaran muatan lokal bahasa Jawa ;

1. Muatan lokal bahasa Jawa, memang sudah selayaknya diberikan pada jenjang Sekolah Menengah Atas, dan apabila melihat kondisi yang ada malah tidak hanya selayaknya namun seharusnya ada.
2. Adanya kerancuan tentang penetapan Standar Kompetensi serta Kompetensi Dasar yang menjadi acuan proses pembelajaran.

Setelah ditarik kesimpulan maka ada beberapa hal yang perlu dijadikan pekerjaan rumah bersama tentang keberadaan muatan lokal bahasa Jawa, bagaimanapun sesuai amanat UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pembinaan bahasa daerah dan sastra daerah menjadi kewenangan daerah, maka perlu dilakukan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Realisasi produk perundang – undangan yang mengatur pembinaan bahasa dan sastra daerah, terutama dengan payung hukum yang lebih kuat terkait diberlakukannya kurikulum muatan lokal bahasa Jawa pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, hingga SMA/MA/SMK. Pemerintah Daerah adalah pihak yang sangat *berkompeten* dalam pembinaan, pengembangan, dan pelestarian bahasa Daerah. Melalui produk perundang-undangan Daerah dengan melakukan kordinasi ke berbagai pihak dan instansi terkait.
2. Perlunya evaluasi tentang penetapan SI dan SKL, sehingga akan berimbas pada penetapan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang benar – benar tepat sasaran.
3. Tumbuh kembangkan wacana positif tentang keberadaan bahasa daerah sebagai sebuah produk budaya yang perlu dilestarikan demi menjaga Indonesia tetap menjadi Indonesia. Karena Indonesia adalah negara yang terkenal dengan kekayaan budaya, dan apabila kekayaan budaya yang telah menjadikan Indonesia tersohor kian memudar lantas menjadi Indonesia lagikah Indonesia ini.
4. Perlu adanya sistem ejaan bahasa Daerah yang sesuai dengan kaidah penulisan bahasa sesuai dengan kekhasan dan karakter masing-masing bahasa Daerah. Hal ini perlu untuk menjaga kemurnian tata eja bahasa

Daerah bersangkutan yang tidak bisa disamaratakan dengan ejaan kaidah bahasa Indonesia, yang jelas sangat berbeda jauh.

5. Bahasa Daerah yang ada perlu dikembangkan dengan menyusun dan memperbanyak serta memperbaiki kamus bahasa-bahasa Daerah dengan lebih baik dan teliti sehingga sesuai dengan kaidah *keilmiahan*.
6. Perguruan tinggi di daerah yang secara khusus dipercaya untuk membuka Program studi bahasa Daerah, perlu bersungguh-sungguh dalam melakukan perannya sebagai ujung tombak pembinaan bahasa dan sastra Daerah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah. Sehingga kedudukan bahasa dan sastra Daerah bisa sebanding dan sejajar dengan program bahasa dan sastra lain.
7. Mari belajar kepada masyarakat Bali yang masih konsisten dengan budaya leluhur mereka, dan imbasnya bisa kita cermati sekarang bagaimana dolar mengalir deras ke Bali, Bali memiliki daya tarik turis asing bukan saja pada *landscape* alamnya namun lebih pada kekayaan budaya dan kekonsistenan masyarakat Bali menjaga budaya tersebut. Jawa Tengah memiliki potensi alam dan budaya yang tidak kalah dengan Bali namun tetap tidak bisa mengalahkan Bali karena budaya Jawa kian pudar berganti budaya barat yang justru mulai usang di negeri asalnya sendiri.

Karena terbatasnya kesempatan maka tulisan ini hanya bersifat tinjauan singkat dan beberapa hal yang memang dirasa perlu untuk mendapat penjelasan lebih terinci akan disampaikan pada lampiran tulisan ini.

Apabila tulisan ini tidak memenuhi target penelitian yang komprehensif, seperti penelitian pada umumnya, itu lebih dikarenakan beberapa faktor, dan tentunya penulis sendiri berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan sebuah penelitian, yang pada nantinya bisa menjadi motivator bagi peneliti – peneliti lain melakukan penelitian yang lebih komprehensif dan secara keilmiahan bisa lebih dipertanggungjawabkan isinya. Semoga ada manfaatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Balai Bahasa Yogyakarta. 2006. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Jawa Huruf Latin yang Disempurnakan*. Edisi revisi. Yogyakarta : Penerbit Kanisius.
- Endraswara, Suwardi. D.k.k. 2007. *Salah Kaprah Bahasa Jawa*. Yogyakarta : Penerbit Narasi.
- Indriati, Etty. 2005. *Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Hasan. Alwi. 2001. “Kebijakan Bahasa Daerah”. Dalam Hasan Alwi dan Abdul Rozak Zaidan (Ed.). *Bahasa Daerah dan Otonomi Daerah : 38-47*. Jakarta. Pusat Bahasa.
- Halim. Amran. 2001. “Pemasyarakatan Bahasa dan Sastra Daerah”. Dalam Hasan Alwi dan Abdul Rozak Zaidan (Ed.). *Bahasa Daerah dan Otonomi Daerah : 50-53*. Jakarta. Pusat Bahasa.
- Moestoko, Sumarsono d.k.k. 1986. *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta : Balai pustaka.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 1998. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Edisi revisi. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Pusat Bahasa. 2001. *Bahasa Daerah dan Otonomi Daerah*. Hasan Alwi dan Abdul Rozak Zaidan (Ed.). Jakarta : Pusat Bahasa.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 2006. “Panduan Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah Menengah Atas”. Kantor Perpustakaan Daerah Jawa Tengah.
- Soedirdja, surjadi. 2001. “Peranan Bahasa Dan Sastra Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi”. Dalam Hasan Alwi dan Abdul Rozak Zaidan (Ed.). *Bahasa Daerah dan Otonomi Daerah : 1-14*. Jakarta. Pusat Bahasa.
- Trimo, Soejono. 1997. *Pedoman Pelaksanaan Perpustakaan*. Bandung : Penerbit PT Remaja Rosdakarya.

REFERENSI LAIN

- BNSP. 2006. *Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*.
- Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas. 2006. *Model Penilaian Kelas Kurikulum Berbasis Kompetensi Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah*.

Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademi dan Kompetensi Guru.

Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan.

Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrash Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrash Tsanawiyah (SMP/Mts), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).

WEBSITE

<http://puskur.net>

<http://diknas.go.id>

<http://dikmenu.go.id>